

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir di Kawasan Dataran Tinggi Dieng sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo, yang berperan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan risiko bencana di wilayah tersebut. Kapasitas lembaga ini cenderung lebih fokus pada kepatuhan terhadap prosedur administratif dan kelengkapan prosedural daripada peningkatan kemampuan adaptif, reflektif, dan inovatif, yang telah menciptakan pola pengelolaan mitigasi yang lebih bersifat *top-down*. Situasi ini memengaruhi cara masyarakat dilibatkan, yang lebih mengarah pada mobilisasi partisipasi melalui program-program, sosialisasi, dan kegiatan tanggap darurat yang digagas oleh pemerintah, alih-alih pada upaya pemberdayaan yang dapat meningkatkan kesadaran bersama dan kemandirian komunitas dalam mengatasi risiko bencana.

Oleh karena itu, meskipun secara kuantitatif keterlibatan masyarakat tampak cukup tinggi melalui keberadaan relawan kebencanaan dan Kampung Siaga Bencana, secara substantif partisipasi tersebut masih bersifat situasional, tergantung pada dorongan eksternal, dan belum berkembang menjadi bentuk kolaborasi yang berkelanjutan. Maka dari itu,

peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD tidak hanya menjadi kebutuhan administratif atau organisasi, tetapi juga merupakan langkah penting untuk menciptakan ekosistem mitigasi bencana yang dapat mendorong transformasi partisipasi masyarakat dari sekadar keterlibatan yang didorong pemerintah menjadi partisipasi yang mandiri, adaptif, dan berbasiskan kekuatan komunitas.

#### **4.2 Saran**

1. Pemerintah perlu melakukan perubahan menyeluruh dari pendekatan yang bersifat reaktif ke arah yang lebih proaktif dengan cara meningkatkan alokasi anggaran mitigasi secara signifikan dari 13,1% menjadi minimal 30-40% dari total anggaran BPBD dengan prioritas pada infrastruktur pencegahan banjir, penguatan kapasitas masyarakat, dan sistem monitoring risiko jangka panjang. Peningkatan anggaran ini harus disertai dengan perubahan cara pandang dalam kebijakan dari yang dulunya reaktif dan defensif menjadi lebih proaktif dan pencegahan, melalui pembuatan peta risiko banjir yang memperhitungkan pergeseran iklim serta perubahan dalam penggunaan tanah, serta penegakan aturan tata ruang yang lebih ketat di daerah yang rentan terhadap bencana. Selain itu, BPBD juga perlu membangun sistem evaluasi dan pembelajaran kelembagaan yang berkelanjutan, serta merubah cara pemberdayaan masyarakat dari pendekatan sementara menjadi pemberdayaan jangka panjang yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara kolaboratif.

Disisi lain, peningkatan kualitas mitigasi juga perlu dilakukan dengan memperluas peran masyarakat dalam pengambilan keputusan, dengan mengubah pola keterlibatan masyarakat yang semula bersifat konsultatif menjadi kolaboratif, yaitu dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan pelaksanaan, hingga evaluasi program mitigasi. Dengan demikian, akan terwujud kapasitas kelembagaan yang seimbang antara aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai mitigasi banjir yang berkelanjutan.

2. Masyarakat harus mengubah pola partisipasi dari yang bergantung pada fasilitas dan dukungan pemerintah menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan budaya kewaspadaan dalam aktivitas sehari-hari, memperkuat kemandirian organisasi lokal seperti KSB yang tetap berjalan aktif secara rutin meskipun diluar situasi darurat atau ancaman bencana. Masyarakat juga bisa mengembangkan dana tanggap darurat bencana berbasis komunitas yang dikelola secara mandiri oleh warga sehingga masyarakat memiliki sumber daya untuk melakukan mitigasi struktural skala kecil tanpa selalu bergantung pada bantuan pemerintah. Masyarakat mengintegrasikan praktik-praktik mitigasi banjir seperti menjaga kebersihan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, dan pengelolaan lahan yang ramah lingkungan ke dalam kebiasaan sehari hari, bukan hanya dilakukan saat musim hujan atau setelah terjadi bencana. Masyarakat juga perlu berperan lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan mitigasi banjir agar

keterlibatan tidak hanya bersifat konsultatif tapi juga benar-benar kolaboratif dalam menghadapi ancaman bencana di Kawasan Dataran Tinggi Dieng.